

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan pemerintah di Indonesia tuntutan akuntabilitas semakin meningkat guna terwujudnya pemerintahan yang baik. Pemerintah Daerah dituntut untuk menerapkan akuntabilitas publik sebagai bentuk dari pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal ini diatur dalam Peraturan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Akuntabilitas publik dapat dilakukan melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bukti aktivitas pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan data keuangan yang digunakan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil kinerja selama satu periode dengan menyediakan data berupa informasi yang dibutuhkan oleh pihak internal dan pihak eksternal sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan daerah secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel sesuai dengan Standar yang telah ditentukan, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan bahwa SAP merupakan standart yang berisikan tentang pedoman para akuntan daerah yang dipergunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Tujuan dari Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu penerapan SAP dalam pelaporan keuangan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, akurat dan terstruktur. Penilaian laporan keuangan daerah berupa opini akan diberikan setiap tahunnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa

yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW) dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Apabila BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD dapat diartikan bahwa laporan keuangan pada pemerintah tersebut disajikan secara wajar dan berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor paling mendasar yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah kompetensi sumber daya manusia.

Dalam penyusunan laporan keuangan SDM yang dibutuhkan adalah SDM yang kompeten dalam bidang akuntansi dan mampu memahami Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) ataupun peraturan lain yang berkaitan dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Apabila kompetensi SDM yang dimiliki semakin baik maka laporan keuangan daerah yang dihasilkan akan semakin baik kualitasnya (Utama et al., 2017). Sebaliknya kegagalan pemahaman dan penerapan oleh SDM akan berpengaruh buruk pada laporan keuangan, misalnya terjadi kesalahan laporan sebab tidak sesuai dengan standart dari pemerintah, sehingga laporan keuangan tersebut berkualitas rendah (Kiranayanti dan Erawati, 2016).

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah seluruh rangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pimpinan, manajemen dan seluruh pegawai untuk meyakinkan sistem pengendalian internal dapat tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal merupakan salah satu bentuk pengendalian yang penting dalam suatu institusi pemerintahan. Pengendalian internal berfungsi untuk melindungi aset pemerintahan dari tindakan kecurangan, penggelapan ataupun tindakan penyimpang lainnya yang dilakukan oleh pihak

dalam maupun pihak di luar pemerintahan. Karena pengendalian intern yang lemah akan menyebabkan kesulitan dalam mendeteksi kecurangan dan ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi ini berguna untuk memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan. Teknologi informasi dapat memudahkan pemerintah daerah untuk menyusun LKPD karena dapat meningkatkan ketepatan waktu dan informasi jika digunakan secara optimal. Pemanfaatan teknologi informasi terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Berdasarkan dari penelusuran pada riset-riset sebelumnya, masih saja ditemukan kesenjangan atau ketidakkonsistenan hasil penelitian (*research gap*) dari beberapa peneliti terdahulu. Hasil penelitian dari Wibowo (2022), Aziyah dan Yanto(2022), Dewi (2022) mengatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak ada pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Binawati (2022), Rifany (2021) mengatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah. Faktor kedua adalah sistem pengendalian internal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi, et. al (2022), Nasution (2022), dan Widayati (2022) mengatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Menurut penelitian dilakukan oleh Ningrum (2018), Ramadhani (2022) berpendapat bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Faktor ketiga adalah pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian atas nama Ningrum (2018), Widayati (2022), dan Ramadhani (2022) mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Menurut Ayuningtyas (2022), Nugroho (2022) mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Desi Ramadhani (2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Desi

Ramadhani adalah pada variabel dependennya dimana pada penelitian ini pemanfaatan teknologi informasi dijadikan sebagai variabel intervening. Menurut Sugiyono (2019:39) variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antar variabel independen dan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Dapat juga diartikan bahwa variabel intervening adalah variabel yang dapat memperlemah dan memperkuat hubungan antar variabel tetapi tidak dapat diamati dan diukur.

Peneliti memilih pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel intervening karena kompetensi SDM dan sistem pengendalian internal tidak dapat lepas dari adanya pemanfaatan teknologi informasi. Keterkaitan antara kompetensi SDM dan sistem pengendalian internal dengan pemanfaatan teknologi informasi adalah dalam menciptakan laporan keuangan daerah yang berkualitas dipengaruhi oleh kompetensi SDM yang kompeten dibidang akuntansi. Selain itu pengendalian internal yang baik dapat meminimalisir adanya tindakan-tindakan yang merugikan. Akan lebih sempurna jika dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi informasi yang baik dapat mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan. Teknologi informasi dapat memudahkan pemerintah daerah untuk menyusun LKPD karena dapat meningkatkan ketepatan waktu dan informasi jika digunakan secara optimal.

Semakin baik terknologi yang dimanfaatkan maka kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal yang dijalankan juga semakin baik. Perbedaan lain penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada analisis data yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya analisis yang digunakan yaitu metode analisis regresi berganda sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *Path Analysis*. Penelitian ini menggunakan tiga teori diantaranya adalah teori kegunaan keputusan (*Decision-Usefulness*), teori sumber daya (*Resourced Based Theory*) dan teori stewardship (*Stewardship Theory*).

Kaitan antara teori *Decision-Usefulness* dengan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi ialah tentang bagaimana pengetahuan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan sistem teknologi dan melakukan pengendalian internal

terhadap prosedur atau kebijakan pemerintah. Sehingga terciptalah laporan keuangan yang relevan dan reliabel. Teori berbasis sumber daya atau *Resourced Based Theory* (RBT) digunakan sebagai penjelasan dari kompetensi sumber daya manusia, kaitan antara RBT dengan kompetensi Sumber Daya Manusia adalah teori ini membahas tentang bagaimana sebuah entitas dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan berdasarkan sumber daya yang mereka miliki. Dengan adanya sumber daya dinilai mampu meningkatkan kinerja terutama dengan adanya kemampuan yang memadai dan kompeten.

Teori *Stewardship* dideskripsikan sebagai suatu situasi dimana manajer/pegawai tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan prinsipal. Teori ini digunakan untuk menjelaskan sistem pengendalian internal. Kaitannya teori *Stewardship* dengan sistem pengendalian internal adalah dengan adanya upaya peningkatan pelayanan publik pada sistem pengendalian internal yang diterapkan akan dapat mengoptimalkan tujuan yang ada yakni mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai.

Peneliti memilih pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik karena terdapat fenomena dimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undang dalam penyusunan laporan keuangan. Sumber dari website resmi pemkabgresik : <https://gresikkab.go.id/dokumen/LKPD>.

Berdasarkan pada pernyataan diatas adanya kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada laporan keuangan daerah sering terjadi karena beberapa sebab misalnya kurangnya pemahaman dalam menyajikan laporan keuangan daerah sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditentukan. Karena dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah penting bagi seorang akuntan mengacu kepada SAP (Standart Akuntansi Pemerintah) yang dimana pemahaman SAP ini ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusiayang paham tentang bidang akuntansi.

Selain itu, kurangnya pemahaman yang tidak lengkap terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku, pemantauan dan pengendalian tidak dapat dilakukan secara optimal, dan kurangnya koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan.

Selain permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal, BPK juga mengungkapkan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undang. Oleh sebab itu, pemerintah harus segera meminimalisir permasalahan yang ada agar tata kelola keuangan daerah dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai : **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada OPDKabupaten Gresik).**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang didasari oleh latar belakang untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi informasi?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi informasi?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
5. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi pemerintah sebagai variabel intervening?
6. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan melalui pemanfaatan teknologi informasi pemerintah sebagai variabel intervening?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini setelah perumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pemanfaatan teknologi informasi.
2. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal terhadap pemanfaatan teknologi informasi.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
5. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel intervening.
6. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel intervening.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini adapun manfaat pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Akademis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber referensi tentang bidang Akuntansi Sektor Publik terutama pada bagian penerapan kompetensi sumber daya manusia, pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi serta kualitas laporan keuangan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengonfirmasi hasil-hasil penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis:

a) Bagi Penulis:

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kualitas laporan keuangan daerah. Serta dapat membandingkan teori yang didapat dari perkuliahan dengan praktek yang sesungguhnya.

b) Bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperbaiki nilai perusahaan.

c) Bagi Pihak Lain:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya serta diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi penambah wawasan bagi para pembaca.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun yang terkandung dalam tugas akhir ini dapat dilihat secara sistematis di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan secara teoritis mengenai tinjauan teori yang digunakan, kerangka konseptual, dan juga hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menerangkan tentang metode-metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian mengenai rencana penelitian, populasi dan sampel juga definisi dan pengukuran

variabel, lokasi dan waktu penelitian, prosedur pengambilan data serta model dan teknis analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang data penelitian, analisis, dan hasil penelitian. Serta pembahasan untuk setiap variabel yang digunakan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis memberikan suatu kesimpulan yang diperoleh, kemudian memberikan beberapa saran yang dapat bermanfaat dan berguna bagi institusi dan pembaca.

